

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan jenis sanksi pelanggaran disiplin tingkat berat terhadap Pegawai ASN dalam peraturan perundang-undangan yang pernah dan sedang berlaku saat ini di Indonesia, beserta untuk mengetahui dan menganalisis apakah rumusan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai ASN terhadap pelanggaran disiplin tingkat berat dalam Pasal 52 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN telah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik serta asas perlindungan hukum bagi Pegawai ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah : pertama, terdapat berbagai pengaturan hukum mengenai penjatuhan hukum disiplin bagi Pegawai ASN di Indonesia. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda, sejalan dengan hal tersebut, permasalahan pemberlakuan berbagai peraturan mengenai penjatuhan hukuman disiplin saat ini menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum dan keadilan yang berdampak bagi Pegawai ASN tersebut. Kedua, pasca berlakunya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka secara langsung tidak mengedepankan pada amanat dari asas perlindungan hukum bagi pegawai asn juga yang mana akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini menimbulkan tumpang tindih dalam memberlakukan penjatuhan hukum disiplin berat bagi ASN yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terkhususnya hukuman disiplin berat sebagaimana yang dilihat dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS), dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, untuk itu diperlukan upaya yaitu dengan cara melakukan inventarisir erta mengesahkan aturan hukum tentang Aparatur Sipil guna memberikan kepastian hukum yang berdasarkan keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Pengaturan, ASN, Pelanggaran Disiplin Peraturan Perundang-Undangan

**ARRANGEMENT OF SANCTIONS AGAINST STATE CIVIL APPARATUS
WHO COMMIT SEVERE VIOLATIONS OF DISCIPLINE FROM A
LEGISLATION PERSPECTIVE**

ABSTRACT

This research aims to find out and analyze the regulation of the types of sanctions for serious disciplinary violations against ASN employees in the laws and regulations that have been and are currently in force in Indonesia, as well as to find out and analyze whether the formula for imposing sanctions for dishonorable dismissal as an ASN employee is for violations. The severe level of discipline in Article 52 of Law Number 20 of 2023 concerning ASN is in accordance with the principles of establishing good laws and regulations as well as the principle of legal protection for ASN employees. The research results show that: first, there are various legal regulations regarding the imposition of disciplinary laws on ASN employees in Indonesia. This gives rise to different interpretations, in line with this, the problem of implementing various regulations regarding the imposition of disciplinary penalties currently shows that the uncertainty of law and justice has an impact on ASN employees. Second, after the enactment of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (UU ASN) which revokes Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, it directly does not prioritize the mandate of the principle of legal protection for ASN employees, which will give rise to interpretations. different ones. This creates an overlap in imposing heavy disciplinary sanctions on ASNs who do not carry out their rights and obligations, especially heavy disciplinary penalties, as seen from Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (UU ASN) which revokes Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline (PP Disziplin PNS), and Regulation of the State Civil Service Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Technical Instructions for Dismissing Civil Servants, for this reason efforts are needed, namely by carrying out an inventory and ratify legal regulations regarding Civil Apparatus to provide legal certainty based on justice and legal protection in Indonesia.

Keywords: *Regulations, ASN, Disciplinary Violations of Legislative Regulations*